

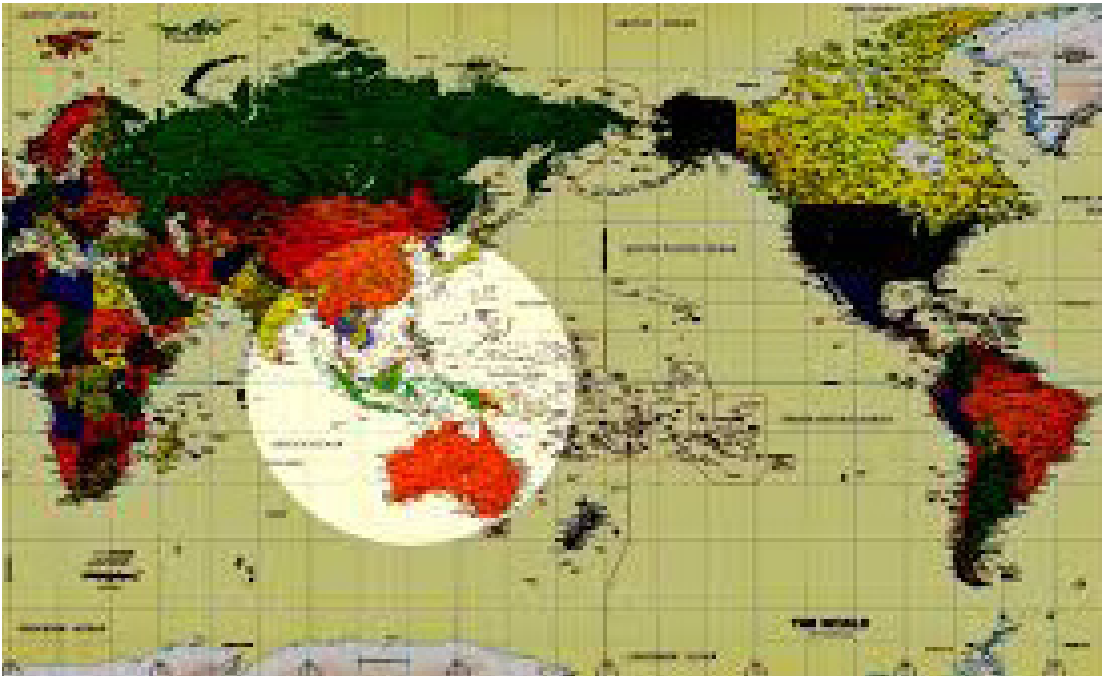
Geopolitik, Negara, dan Bangsa Masa Kini

Kris Wijoyo Soepandji, S.H., M.P.P.
Dosen Bidang Studi Dasar-Dasar Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Abstrak

Permasalahan geopolitik pada masa sekarang adalah suatu hal yang sangat kompleks karena menyangkut bagaimana bangsa, negara serta masyarakat pada umumnya berinteraksi dengan tidak melepaskan kepentingannya masing-masing. Pada saat yang bersamaan, perkembangan teknologi telah membawa pada suatu kondisi yaitu interaksi tersebut terjadi secara sangat cepat yang belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Keberadaan interaksi yang tinggi ini dapat membawa keberkahan namun juga bencana bagi umat manusia, yang sangat tergantung dengan bagaimana para aktor untuk memahami dan memanfaatkan kemampuan geopolitik. Pemahaman dan kemampuan memanfaatkan geopolitik akan memberikan para aktor strategis suatu kesadaran terhadap konsekuensi untuk setiap kebijakan strategis yang diambilnya. Pemahaman geopolitik adalah mustahil dikembangkan tanpa mengakui pentingnya keberadaan konsep bangsa dan negara di masa kini.

Kata Kunci: geopolitik, negara, bangsa, kepentingan nasional, dan keteraturan



ilustrasi: theglobal-review.com

PENDAHULUAN

Geopolitik adalah suatu istilah yang berkembang pertama kali di kalangan masyarakat elit Eropa dalam menggambarkan pertarungan kepentingan antar entitas di Eropa dan dunia saat itu. Istilah ini pada intinya berkaitan dengan studi interaksi antar kelompok manusia yang berkaitan dengan kekuasaan dengan memperhatikan realitas geografis yang dihadapinya. Meskipun istilah tersebut berkembang di Eropa, namun, masyarakat Nusantara memiliki pemahaman terhadap istilah tersebut sebagai suatu konsep tersendiri. Hal ini tertuang dalam *Serat Sasangka Jati* yang pada tahun 1932 di Surakarta, atas petunjuk Ilahi (*Suksma Sejati*), R. Soenarto Martowardojo, menyampaikan bahwa interaksi unsur-unsur alam seperti api, air, angin, dan tanah yang berada di suatu wilayah tertentu sangat mempengaruhi pembentukan karakter dan kondisi fisik penduduk yang mendiami daerah tersebut. Karakter dan kondisi fisik masyarakat tersebut itulah yang menjadi

studi penting interaksi geopolitik di berbagai masyarakat dunia yang sangat beragam namun oleh teknologi dibawa menjadi sedemikian dekat, sehingga potensi konflik akibat perbedaan karakter dan pemahaman akan tinggi apabila para aktor tidak memiliki kesadaran geopolitik. Bung Karno sebagai tokoh utama yang memerdekakan bangsa Indonesia menyadari pentingnya pemahaman terhadap geopolitik bagi para pembuat kebijakan strategis Indonesia. Oleh sebab itu pada tahun 1965 beliau mendirikan Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhannas sebagai wadah pendidikan dan kajian geopolitik.

Tulisan ini akan menjawab pertanyaan berkaitan dengan perkembangan konsep geopolitik serta hubungannya dengan konsep negara dan bangsa terkini. Adapun tujuan dari tulisan ini adalah untuk memberikan pandangan yang mendalam bagi pengambil kebijakan strategis Indonesia mengenai konsep geopolitik, negara dan bangsa yang berkembang di masa kini, sehingga dalam memformulasikan kebijakan mereka dapat

mempertimbangkan segala aspek strategis yang berdampak pada kelangsungan hidup dan keselamatan bangsa Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelusuran literatur terkini mengenai konsep-konsep geopolitik, negara, dan bangsa yang dituliskan oleh *leading scholars* di bidang tersebut serta praktisi yang menggeluti praktek geopolitik di tataran pengambil kebijakan strategis. Konsep-konsep tersebut kemudian dianalisa dengan fakta-fakta yang telah maupun yang sedang terjadi dengan melakukan perbandingan antara fakta-fakta dikaitkan dengan konsep-konsep yang digunakan.

PEMBAHASAN

Perkembangan Isu Geopolitik Masa Kini

Istilah geopolitik meskipun sudah hampir seratus tahun menjadi populer di kalangan cendekiawan, negarawan serta militer, namun pengertian geopolitik masih memiliki makna yang berbeda-beda tergantung oleh siapa istilah tersebut ditafsirkan menurut kepentingan masing-masing pihak tersebut. Sehingga tidak salah apabila ada ahli yang bernama Klaus Dodds mengatakan bahwa *“geopolitics is a slippery term”*, walaupun kemudian Dodds menyatakan juga bahwa *“it is essential to be geopolitical.”* Pemahaman geopolitik adalah penting karena akan membantu kita memahami situasi yang terjadi terutama yang berhubungan dengan aktivitas negara dan masyarakat luas. Hal tersebut memungkinkan karena geopolitik memberi kita suatu gambaran tentang interaksi kepentingan dan pada akhirnya bagaimana hukum digunakan baik di dalam maupun di luar negeri untuk kepentingan tertentu.

Guna memperoleh pengertian geopolitik secara mendalam perlu kita perhatikan beberapa ahli yang mencoba mendefinisikannya. Salah satu ahli yang perlu

kita perhatikan adalah Sophie Chautard yang berasal dari Prancis, yang mengatakan bahwa geopolitik bukanlah sebuah ilmu sains namun sebuah disiplin yang mempelajari hubungan antara ruang dan politik (interaksi manusia). Pippa Malmgren, seorang cendekiawan yang pernah menjadi bagian dari *strategic policy-making* di pemerintahan Amerika Serikat dalam bukunya *Geopolitics for Investors* menuliskan bahwa, geopolitik secara umum dihubungkan dengan proyeksi negara ke luar negeri dengan berbagai cara atau alat dari negara. Definisi tersebut mencakup bagaimana negara secara aktif menggunakan kekuatannya di luar negeri serta tindakan pasif dalam merespon usaha geopolitik dari pihak lain yang menggunakan kekuatannya. Hal ini juga mencakup semua aspek dari kedaulatan dan kekuasaan, tanpa memandang apakah alatnya atau tujuannya adalah ekonomis atau politis. Ungkapan secara umum adalah penting untuk diperhatikan karena hal itu memberikan ruang bagi aktor bukan negara yang dewasa ini semakin menjadi sumber tekanan geopolitis bagi negara dan obyek dari usaha geopolitik negara. Sedangkan Cohen berpendapat bahwa, *“Geopolitics is defined... as the analysis of the interaction between, on the one hand, geographical settings and perspectives and on the other, political processes.”* Collin Flint menyampaikan bahwa, *“Contemporary geopolitics identifies the sources, practices, and representations that allow for the control of territory and the extraction of resources.”* Dari penjelasan para ahli di atas dapat ditarik tiga hal yang penting yaitu; (1) mengenai interaksi manusia dalam suatu hubungan kekuasaan (politik) di dalam suatu ruang tertentu; (2) bagaimana aktor utama geopolitik tidak lagi terpusat pada negara tetapi pada aktor selain negara yang semakin punya peran dan legitimasi yang tinggi; (3) berkaitan dengan penguasaan dan

pemanfaatan sumber daya.

Apabila dahulu nenek moyang kita mengenal VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie* atau Perusahaan dagang Belanda di Hindia Timur) yang sangat berkuasa dalam mengatur konflik kerajaan-kerajaan di Nusantara, maka kini masyarakat dunia mengenal perusahaan-perusahaan multi nasional yang bisa memengaruhi kebijakan negara secara dominan. Maka dapat juga dipahami di tengah perkembangan dunia *digital* saat ini definisi ruang tidak lagi hanya berkaitan dengan ruang fisik tetapi juga termasuk ruang maya, seperti halnya isu serangan siber terhadap Estonia berberapa waktu lalu serta dugaan manipulasi pemilu di Amerika Serikat melalui penetrasi *digital*. Contoh lainnya adalah dalam dunia maya sekarang marak akan jual-beli *online* yang para penjualnya berasal dari suatu negara tertentu mengincar pembeli-pembeli yang berasal dari negara-negara dengan kelas menengah yang berkembang.

Apabila negara berkembang tersebut kaya akan sumber kekayaan alam, maka secara tidak langsung penjual *online* yang produknya laku tersebut ikut menguasai pemanfaatan sumber kekayaan alam negara tersebut. Hal tersebut tentunya di luar penguasaan langsung yang mungkin terjadi apabila pengelolaan sumber kekayaan alam negara tersebut dilakukan oleh aktor bukan negara yang bersifat multi-nasional namun pemanfaatannya tidak dilaksanakan atas dasar nilai-nilai yang berkeadilan. Dalam hal ini hukum memiliki peran yang sangat penting apabila digunakan dengan melihat dan menyadari peta besar kepentingan yang terjadi. Khusus masyarakat Indonesia yang meningkat terus kelompok kelas menengahnya, telah banyak menjadi korban penipuan melalui aktivitas *online*, sehingga apabila tidak ada intervensi

dari negara maupun pihak-pihak yang memiliki perhatian khusus terhadap hal tersebut, maka permasalahan ini bisa terus terjadi. Permasalahan ini pada dasarnya terjadi karena ada perubahan pemahaman masyarakat terhadap ruang yang sebelumnya fisik dan konkrit menjadi maya. Dalam kondisi geopolitik seperti inilah pemahaman hukum harus terus berkembang.

Banyak kalangan yang menyamakan geopolitik dengan kebijakan luar negeri, padahal geopolitik memiliki makna yang lebih mendalam. Bagi beberapa ahli yang menekuni bidang geopolitik, ilmu geopolitik juga menyangkut hal-hal yang terjadi di luar kemampuan suatu negara untuk mengendalikannya. Pembajakan oleh bajak laut di selat Malaka tidak bisa dengan mudah dipahami dalam konteks hubungan internasional tetapi ia lebih mudah dipahami dalam konteks geopolitik. Hubungan internasional negara-negara Eropa barat serta Australia tidak bisa memenuhi kebutuhan suatu isu yang berkaitan dengan sengketa teritorial di Laut Tiongkok Selatan, sedangkan geopolitik bisa. Maka itu tidak mengherankan pada 9 November 2015, Presiden Italia, Sergio Mattarella berbicara di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) tentang kepentingan Italia dalam isu Laut Tiongkok Selatan dalam konteks geopolitik.

Dalam menggunakan analisa geopolitik terdapat batasan-batasan tertentu yang harus kita pahami yaitu, ia tidak dapat memrediksi kapan waktu yang pasti atas suatu kejadian penting, krisis, titik-titik kunci yang mendorong perubahan radikal dalam suatu peta geopolitik. Namun analisa geopolitik dapat membantu pembuat kebijakan untuk fokus pada kondisi-kondisi yang memungkinkan terjadinya perubahan geopolitik. Pada akhirnya memahami geopolitik adalah hasil dari identifikasi

terhadap pemahaman akan situasi, di mana geopolitik bukan hanya berkaitan dengan kompetisi antar-negara, karena kompetisi untuk menguasai suatu ruang atau wilayah bukan hanya urusan negara.

Geopolitik juga berkaitan dengan konflik rasial dalam suatu kota, bahkan halangan bagi perempuan untuk berpergian secara bebas atas dasar hukum tertentu. Geopolitik juga berkaitan dengan orang-orang yang turun ke jalan untuk protes, kegiatan lembaga swadaya masyarakat, bahkan aktivitas perusahaan privat sekalipun, maka itu geopolitik adalah tindakan beragam dan perwakilan beragam dari berbagai macam wilayah. Mari kita ambil contoh hukum pidana Indonesia yang mengenal teritorial Indonesia maka saat ada ketentuan internasional yang mengatur tentang tindak pidana di luar aturan hukum pidana Indonesia yang berlaku dan kemudian pemerintah Indonesia meratifikasi peraturan tersebut maka ketentuan tersebut menjadi berlaku di Indonesia. Adapun hal kritis yang perlu kita pahami adalah apakah peraturan baru tersebut secara geopolitik memang pada hakikatnya berhubungan dengan kepentingan nasional atau merupakan kemenangan kepentingan di luar bangsa Indonesia dalam melakukan kontrol teritorial melalui perangkat hukum.

Prof. Budi Susilo Soepandji memberikan suatu koridor dalam melakukan analisa geopolitik yang cukup penting yaitu "(analisa) geopolitik (suatu bangsa) pada intinya menyangkut tiga unsur penting yaitu, sejarah panjang suatu bangsa beserta lingkungan strategisnya, posisi geografis dari bangsa tersebut, serta cita-cita atau aspirasi bangsa tersebut." Sejarah memang tidak mungkin secara persis diulang namun, dalam sejarah terdapat suatu gambaran tentang perangai atau kecenderungan seseorang, kelompok atau bahkan suatu bangsa dalam menyikapi

suatu situasi geopolitik yang terbentuk atas interaksi dengan lingkungan strategisnya baik manusia lainnya maupun dengan alamnya yang secara alamiah menjadi kenyataan geografis, dari hal tersebut kemudian bisa dengan lebih mudah kita memahami apa yang menjadi aspirasi maupun cita-cita manusia atau kelompok manusia tersebut.

Hal tersebut juga ditekankan oleh Prof. St. Munadjat Danusaputro seorang ahli hukum lingkungan dari Universitas Padjadjaran, melalui orasi ilmiahnya yang berjudul, "*Ketahanan Nasional*" dalam rangka peringatan HUT-ke14, Lemhannas RI, 20 Mei 1979. Saat itu beliau mengambil pendapat, Bernard Chenot dalam "*Le Conseil d'Etat, son histoire a travers les documents d'époque 1799-1974*", (*Edition du Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, 1974*), *Avant Propos, p. vii*; "... *pour connaitre un homme, un peuple ou une institution, il faut d'abord apprendre son histoire. A travers les ages et par l'action des hommes qui l'ont animé, sous la pression des événements et par l'affirmation de quelque principes, le Conseil d'Etat d'aujourd'hui c'est lentement formé.*"

Ungkapan tersebut bermakna, "untuk mengenal seseorang, suatu bangsa atau lembaga, orang harus pertama-tama mempelajari sejarahnya. Dari abad ke abad dan berkat jerih-payah orang-orang yang telah menjiwainya, di bawah tekanan kejadian-kejadian dan karena penegasan prinsip-prinsipnya, terbentuklah perlahan-lahan *Conceil d'Etat* dewasa ini".

Contoh dari ungkapan di atas yang bisa kita pelajari adalah bagaimana Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang saat itu dipimpin oleh Ketua Mao. Dalam menghadapi konflik perbatasan dengan India, mereka menggunakan analogi zaman dinasti-dinasti sebelumnya. RRT memiliki sejarah panjang ribuan tahun membentuk bangsanya,



pemahaman akan dirinya sebagai kerajaan tengah atau ‘*Zhongguo*’ adalah suatu hal yang terus bertahan dalam *strategic culture* pembuat kebijakan strategis Tiongkok. Saat negara RRT memasukkan Laut Tiongkok Selatan dalam peta di paspor warganya dan kemudian menjadi isu panas dalam hukum laut internasional di kawasan Asia Timur, maka bangsa Indonesia perlu memahami hal tersebut dalam konteks sejarah Tiongkok yang saat ini menjadi kenyataan geopolitik.

Berangkat dari contoh kebijakan RRT di atas, maka kita perlu memahami bahwa cara suatu negara (atau entitas yang tengah berkompetisi atas suatu ruang) memosisikan dirinya di tengah pergaulan dunia, disebut sebagai *kode geopolitik*. Setiap negara memiliki kode geopolitik. Sebagai contoh, pada abad kedua puluh satu Amerika Serikat memiliki kalkulasi geopolitik dengan berdasarkan kepentingan nasionalnya yang membuat ia memutuskan bahwa kehadirannya di titik-titik strategis dunia sebagai kode geopolitiknya. Saat pidato ‘Lahirnya Pancasila’ 1 Juni 1945, Bung Karno mengharapkan negara Indonesia yang akan lahir adalah negara yang dibentuk berdasarkan ‘kenyataan geopolitik’ yang tidak terpecah-pecah. Hal itu merupakan kode geopolitik bangsa Indonesia yang hingga saat ini, masih dipertahankan oleh pengambil kebijakan strategis Indonesia, yang sebelumnya telah diformalkan melalui perjanjian internasional, *United Nations Convention on the Law of the Sea* atau UNCLOS pada tahun 1982. Kode geopolitik yang dimaksud tersebut adalah bersifat teritorial. Sedangkan saat 18 Agustus 1945 dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, para pendiri Republik Indonesia mencantumkan salah satu tujuan negara Indonesia, sebagai “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,” maka itu adalah kode

geopolitik bangsa Indonesia yang kemudian salah satunya diterjemahkan dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004, tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), Pasal 7, Ayat (2), Poin b. (6), menjelaskan bahwa salah satu tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang adalah melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri Republik Indonesia.

Amerika Serikat pernah mendefinisikan kepentingan nasionalnya, sebagaimana dirilis oleh *Commission on America’s National Interest* pada Juli 2000, dalam dua prioritas utama, yaitu, *vital interests* dan *extremely important interests*. *Vital interests* memiliki definisi sebagai suatu kondisi yang secara ketat harus ada guna menjaga dan memperkuat keselamatan dan kemakmuran rakyat Amerika dalam wadah negara yang merdeka dan aman. Dengan mengikuti penjelasan tentang prioritas kepentingan Amerika Serikat kita dapat memiliki gambaran tentang kebijakan negara tersebut dalam menggunakan instrumen-instrumennya baik di dalam maupun di luar negeri. Malmgren mencatat bahwa, “*national interests can conflict and often do,*” maka hal inilah yang perlu kita perhatikan secara seksama.

Perkembangan Konsep Negara dan Nasionalisme

Untuk memahami negara sebagai aktor yang masih dominan dalam situasi geopolitik saat ini maka perlu kita memahami apa itu negara serta aspek-aspek apa yang menopangnya. Interaksi eksternal dan internal negara-negara di dalam era modern telah menunjukkan suatu dinamika yang cukup memberikan suatu tantangan baru dalam mendefinisikan apa yang sebenarnya terjadi saat ini. Maka itu ada baiknya kita mempelajari terlebih dahulu pandangan Prof. Djokosoetono, yang dalam salah satu

kuliahnya menyampaikan, “Mengapa buku Herman Heller yang kita pilih, yang kita anggap paling baik? Jawabannya: Oleh karena dalam mengupas suatu persoalan, Heller selalu *theorie-bewust* dan *method-bewust*. Ia selalu sadar akan *theoritische verantwoordelijkheid* dan *methodologie*... Metoda yang digunakan oleh Heller ialah *method van kennisverkrijging* yaitu yang dipikirkan dulu sendiri apa persoalannya, apa *probleemstelling*-nya...” H.E. H Mosler yang merupakan mantan hakim serta Wakil Presiden dari *International Court of Justice*, bahkan menggunakan definisi negara yang disampaikan oleh Heller dengan menuliskan,

“The general definition of a State given by the legal philosopher Hermann Heller, as an organised unit of effective action and decision, ‘eine organisierte Entscheidungs- und Wirkungseinheit.’ Then we might say that the nation State is a political unit of effective nation, consisting of a people conscious of being a nation. This consciousness might be derived from history, from ethnic and linguistic unity, from common interests or from other motives in the formation of such a community of common destiny.”

Herman Heller menyampaikan bahwa hakekat negara, adalah *Entscheidungseinheit*, “Suatu kesatuan yang berwibawa untuk memutuskan hal-hal yang penting bagi negara,” dan *Wirkungseinheit*, “Suatu kesatuan yang berwibawa untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan negara yang telah diputuskan.” Sebagaimana telah Mosler sampaikan di atas bahwa Heller sebagai seorang *legal philosopher* mendapatkan definisi atas negara berdasarkan pemahamannya yang

mendalam terhadap pentingnya sejarah.

Salah satu contoh yang bisa menggambarkan konsep *entscheidungseinheit* secara negatif adalah masa akhir dari Uni Soviet. Uni Soviet meskipun dalam kondisi ekonomi yang sulit, secara internasional pada akhir 1980-an, masih tetap memiliki jaringan komunisme internasional yang kuat, jaringan intelijen yang kokoh, serta kekuatan militer yang masih sangat diperhitungkan oleh dunia. Namun saat terjadi dinamika yang kemudian membuat sistem komunisme goyah terutama di kawasan Eropa Timur, anggota-anggota dinas intelijen Soviet yang bertugas di daerah tersebut merasakan tidak ada keputusan dari Moskow, hingga akhirnya perlahan-lahan tapi pasti Eropa Timur lepas dari cengkraman komunisme, pada akhirnya juga membuat Uni Soviet pecah. Vladimir Putin, Presiden Republik Federasi Rusia yang merupakan mantan anggota dinas intelijen Soviet mengatakan bahwa runtuhnya Soviet adalah salah satu bencana geopolitik abad ke-20.

Runtuhnya Uni Soviet tidak lepas dari proses reformasi internal di Partai Komunis Uni Soviet (PKUS) yang dijalankan oleh Sekretaris Jenderal PKUS Mikhail S. Gorbachev seorang alumnus Fakultas Hukum dari Universitas Negeri Moskow, dengan istilah *Perestroika* dan *Glasnost*. Tindakan Gorbachev tersebut ternyata menimbulkan goncangan dalam sistem pengambilan keputusan Uni Soviet yang tidak terbiasa dalam keterbukaan dan reformasi, sedangkan Gorbachev memiliki keyakinan bahwa sistem Soviet bila tidak direformasi akan menimbulkan permasalahan yang lebih berbahaya. Ada ungkapan menarik tentang apa sebenarnya makna dari *Glasnost* dari seorang wartawan ternama di Uni Soviet, Vitaly Korotich yang menulis di *Ogonyok*, “akan selalu ada orang-orang di Barat yang mengatakan bahwa kami bertindak untuk



menipu dunia, namun yang penting bukan kami harus menanggapi anggapan tersebut dengan bantahan namun kami harus bertindak sedemikian rupa agar tindakan kami tidak menipu diri sendiri.” Ungkapan yang begitu indah, namun perubahan yang drastis atas suatu sistem negara yang telah puluhan tahun bertumpu pada perspektif dan tindakan yang kaku ternyata membawa kehancuran total dari sistem Uni Soviet.

Kejadian yang dialami oleh Uni Soviet berbeda dengan apa yang dialami oleh Jerman Nazi, dalam prakteknya meskipun kepemimpinan Jerman Nazi dengan konsep *Fuhrerprinzip*, di mana Adolf Hitler adalah sebagai pemimpin tertinggi mengalami berbagai upaya kudeta dengan yang terkenal adalah Plot 20 Juli 1944 atau Operasi *Valkyrie*, namun kepemimpinannya terus diikuti. Kekalahan akhirnya benar-benar tiba setelah Angkatan Bersenjata Jerman dan seluruh rakyat Jerman benar-benar sudah tidak bisa melawan atau *wirkungseinheit* yang bertugas mengawal keputusan politik dari suatu *entscheidungseinheit* tidak bisa berjalan dengan efektif. Hal ini bisa terjadi adalah karena keberhasilan proses cuci otak rezim tersebut terhadap rakyat Jerman, proses tersebut dikenal dengan kebijakan *gleichschaltung*. Bahkan setelah Berlin jatuh dan Jerman kalah perang dalam salah satu makan malam di tepi Laut Hitam, Stalin, diktator Uni Soviet, menyampaikan pendapatnya tentang Hitler sebagai berikut,

“I agree that he was an adventurer but I can’t agree he was mad. Hitler was a gifted man. Only a gifted man could unite the German people. Like it or not...the Soviet Army fought their way into the German land...and reached Berlin without the German working-class ever striking against...the Fascist

regime. Could a madman so unite his nation? “

Kejadian yang terjadi di Libya, saat Muammar al-Qaddafi menghadapi perang saudara di negaranya yang kemudian secara geopolitik dimanfaatkan oleh bandit-bandit kawasan untuk masuk dengan dukungan sumber daya serta propaganda, dinamika yang bergerak demikian cepat seperti ibarat tsunami politik bagi pemerintahan Qaddafi membuat anggota elit pemerintahannya mengundurkan diri, serta pilot yang bertugas melawan pemberontak melarikan pesawat tempur yang diawakinya ke negara Malta. Saat itulah Qaddafi memutuskan melarikan diri dari pusat pemerintahannya hingga akhirnya ditangkap dan dieksekusi dalam suatu amukan massa. Pemerintahan Qaddafi di Libya yang berlangsung cukup lama ternyata dalam menyikapi perkembangan geopolitik tidak mampu menjaga elemen penting dari hakekat sebuah negara sebagaimana diungkapkan oleh Herman Heller yaitu, *entscheidungseinheit* dan *wirkungseinheit*.

Chas W. Freeman Jr dalam memetik pengalamannya selama berdiplomasi menuliskan bahwa:

“States are bodies politics. They are manifested in governments controlling a defined territory. States are established to protect the interests and realize the aspirations of those who create them. Governments exist to sustain people’s sovereign independence and to promote its welfare and tranquility. National interests are the relationships a government perceives to exist between these purposes and the wealth and power of other states. The national interests of a state constitute a hierarchy of imperatives”

Penjelasan Freeman secara jelas menyatakan tentang *'power of other states'* artinya keefektifan suatu negara sangat ditentukan oleh kenyataan geopolitik. Dalam hal ini *'power of other states'* seyogyanya bisa dipahami juga sebagai *'power of other entities'* mengingat dalam beberapa episode sejarah menunjukkan bahwa ada entitas-entitas non negara yang memiliki kekuasaan luar biasa, misalnya *East India Company* di masa lalu, serta pada zaman sekarang dimanifestasikan dalam lembaga-lembaga keuangan yang sangat berkuasa.

Untuk memahami konsep negara modern yang sekarang kita terima ada baiknya kita memahami bagaimana konsep tersebut berkembang dan akhirnya menyebar keseluruh dunia. Untuk itu kita perlu memerhatikan pandangan Henry Kissinger dalam bukunya *World Order*, ia menjelaskan bahwa konsep negara *modern* yang saat ini diterima secara universal di dunia adalah hasil dari perjanjian *Westphalia* tahun 1648, pasca perang tiga puluh tahun di benua Eropa, di mana antar negara saling menyerang atas dasar perbedaan agama, sistem politik dan sebagainya. Oleh karena tidak tercapai kemenangan yang signifikan dari berbagai pihak maka disepakatilah konsep kedaulatan yang pada intinya, mereka sepakat untuk tidak akan saling mengganggu urusan domestik masing-masing negara. Pada zaman itu perjanjian *Westphalia* tidak dibuat atas suatu tujuan yang mulia atau cita-cita untuk sistem global tetapi hasil dari kenyataan sejarah bahwa mereka harus berhenti berperang. Kesepakatan *Westphalia* tidak serta merta berdampak pada belahan dunia lain di luar Eropa, karena kekuasaan Kekaisaran Tiongkok dan Kesultanan Islam memiliki konsep yang jauh berbeda. Namun seiring perubahan zaman, saat pemikiran Eropa menyebar dalam gelombang

imperialisme dan kolonialisme global, maka konsep *Westphalia* mulai diterima di berbagai belahan dunia. Bahkan saat terjadi perang anti-kolonialisme dan anti-imperialisme di negara-negara jajahan, konsep ini dipakai untuk melawan penjajahan,

"Of all the concept of order, Westphalian principles are, at this writing, the sole generally recognized basis of what exists of a world order. The Westphalian system spread around the world as the framework for a state-based international order spanning multiple civilizations and regions because, as the European nations expanded, they carried the blueprint of their international order with them. While they often neglected to apply concepts of sovereignty to the colonies and colonized peoples, when these peoples began to demand their independence, they did so in the name of Westphalian concepts. The principles of national independences, sovereign statehood, national interest, and noninterference proved effective arguments against the colonizers themselves during the struggles for independence and protection for their newly formed states afterward."

Konsep kedaulatan diwujudkan dalam bentuk tindakan tidak saling mengintervensi kepentingan domestik suatu negara, dapat diilustrasikan dengan beberapa contoh sebagai berikut; (1) Presiden Kedua Republik Indonesia Suharto, menggunakan konsep ini secara tegas dan jelas sebagaimana ia sampaikan dalam buku otobiografinya, bahwa dalam hubungan antar negara sangat penting untuk menghormati kedaulatan setiap negara tanpa saling mengintervensi, termasuk di



dalamnya menolak segala bentuk pemaksaan dengan cara mengeksport ideologi; (2) Namun seiring berjalannya waktu, walaupun konsep non-intervensi terhadap kedaulatan negara lain dipertahankan sebagai suatu *international law framework*, saat ini berkembang juga suatu konsep intervensi sebagai sebuah tugas yang didasarkan pada pembenaran bahwa *human security is beyond national security*.

Dominique Moisi, seorang pendiri dari *French Institute of International Affairs* (IFRI), menuliskan dalam bukunya yang berjudul, *the Geopolitics of Emotion: How Cultures of Fear, Humiliation, and Hope are Reshaping the World*, bahwa, konsep tersebut walaupun terlihat mulia, namun cukup berbahaya, karena untuk mewujudkannya membutuhkan suatu kondisi yang saat ini belum bisa dipenuhi. Masih menurutnya, tanpa strategi politik dan mekanisme institusional yang memiliki legitimasi di mata berbagai pihak, kebijakan intervensi tersebut akan semakin memperuncing suasana internasional yang saat ini semakin tidak kondusif.

Kemudian menurut Kissinger, bahwa segala bentuk sistem keteraturan global, untuk bisa berlaku dalam jangka waktu yang lama haruslah diterima sebagai suatu sistem yang adil, tidak hanya oleh para pemimpin tetapi juga oleh rakyatnya. Ada dua hal esensial yang harus diperhatikan bahwa keteraturan tanpa kebebasan hanya akan menciptakan keteraturan semu yang pada ujungnya akan berbalik menjadi perlawanan. Sedangkan kebebasan tidak bisa didapatkan atau dipertahankan tanpa kerangka keteraturan guna menjamin situasi yang damai. Walaupun keduanya sering dibenturkan sebagai sesuatu yang berbeda namun sebenarnya keduanya saling bergantung.

Hubungan keteraturan dan kebebasan dapat diibaratkan seperti seseorang

mengendarai sepeda motor balap di sirkuit, ia tetap bisa melaju meskipun miring ke kiri atau ke kanan karena adanya kompensasi kecepatan yang tinggi, karena tanpa kecepatan yang tinggi, untuk dapat mendapatkan keseimbangan sepeda motor tersebut harus dikendarai secara tegak. Analogi ini dapat kita pahami untuk melihat Partai Komunis Tiongkok yang berkuasa dengan cara sistem otoriter, maka untuk menjaga keberlangsungan sistemnya yang menekan kebebasan politik tersebut ia memberikan kompensasi dengan kesejahteraan yang ditopang dengan pertumbuhan ekonomi. Maka itu tidak mengherankan bahwa RRT dalam kebijakan politik dan ekonomi luar negerinya sangat agresif karena adanya kewajiban untuk memastikan kestabilan ekonomi yang merupakan pijakan dari kestabilan politik dalam negeri.

Amerika Serikat yang saat ini bisa mengimplementasikan demokrasi dan kebebasan di negaranya tidak lepas dari proses panjang dalam membangun sistem keteraturan dalam negerinya. Dalam sejarah Amerika Serikat, hak pilih dalam pemilu bagi warga negara mengalami evolusi yang membutuhkan waktu cukup panjang, sehingga hak memilih bisa dinikmati oleh sebagian besar dari rakyatnya seperti pada masa sekarang. Kebebasan yang saat ini bisa dinikmati dan terlihat dengan jelas di Amerika Serikat adalah hasil proses keteraturan yang panjang baik secara politik maupun ekonomi.

Kondisi tersebut tentunya berbeda dengan yang dialami oleh bangsa-bangsa Asia Afrika yang baru saja merdeka, baik dari penjajahan maupun feodalisme lama, sehingga mereka merasa perlu untuk membangun dirinya secara sosial-ekonomi-politik-militer guna mengimbangi dinamika geopolitik di kawasannya. Kebijakan yang diambil adalah dengan mengutamakan *order*

atau keteraturan guna mengejar kemajuan ekonomi sehingga saat kestabilan sosial-ekonomi tercapai lambat laun *order* tersebut mengalami relaksasi.

Konsep negara seperti ini kemudian menjadi model, terutama di kawasan Asia dan dikenal dengan istilah *developmental states*. Konsep *developmental states* sebagaimana pernah dibahas dalam kuliah *Politics and Public Policy* yang difasilitasi oleh Suzaina Kadir dan Kenneth Paul Tan di *Lee Kuan Yew School of Public Policy*, sekitar tahun 2012, adalah konsep di mana negara mengambil peran besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi hingga situasi politik menjadi stabil. Tujuannya adalah agar negara tersebut dapat bertahan dalam menghadapi dinamika geopolitik domestik dan luar negeri. Konsep *developmental states* bukanlah model negara yang hanya menekan rakyatnya secara otoriter, untuk kemudian kekayaan negara dirampok dengan tidak ada kemajuan seperti yang terjadi di negara-negara diktator yang gagal di Afrika. Contoh negara *developmental states* adalah Korea Selatan, Jepang, Singapura, Taiwan, Malaysia dan Indonesia.

David Runciman yang berasal dari Universitas Cambridge dalam bukunya *Politics*, menuliskan bahwa politik sangat menentukan nasib suatu bangsa dan negara, sehingga kesadaran berpolitik rakyatnya adalah kunci utama kemakmuran, tanpa kesadaran utuh dari masyarakat untuk berpolitik, kebijakan publik yang merupakan dampak dari keputusan politik dapat dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu secara tidak bijaksana. Ia mengambil contoh dari negara Suriah dan Denmark. Saat ini Denmark merupakan negara dengan standar kehidupan salah satu tertinggi di dunia, sedangkan Suriah menjadi ladang perang saudara yang mematikan, padahal ada suatu masa ketika Suriah pernah menjadi tempat yang sangat maju sedangkan Denmark

ada kawasan yang sangat terbelakang. Hal itu semua menurut Runciman adalah karena keputusan politik negara.

Runciman melanjutkan bahwa, asal usul negara sebagaimana digambarkan oleh Hobbes adalah untuk menghindari kekacauan dalam masyarakat naturalis, akibat tidak ada pihak yang memegang monopoli kekerasan sehingga semua pihak merasa bisa menggunakan kekerasan. Hobbes berpendapat bahwa solusi yang terbaik untuk hal tersebut adalah dengan memberikan kekuasaan untuk menggunakan kekerasan di tangan satu pembuat keputusan. Hobbes menyebut pembuat keputusan sebagai '*the sovereign*.' '*The sovereign*' yang memegang '*sovereignty*' atau kedaulatan itu pada hakekatnya adalah sebuah monopoli. Meskipun pada kenyataannya dalam masyarakat yang paling damai pun terjadi kekerasan baik itu karena tindakan kriminal atau apapun. Maka kedaulatan adalah monopoli atas hak untuk menggunakan kekerasan sebagai solusi atas konflik sosial.

Praktek politik di era modern tentunya sudah jauh berbeda dengan era Hobbes serta era Machiavelli yang terkenal dengan bukunya 'Sang Pangeran' sebuah catatan tentang cara memimpin, perbedaan zaman ini sangat jelas dalam pemahaman terhadap moral dan dinamika psikologis. Alasannya adalah praktek politik modern merupakan kombinasi antara kekuasaan pribadi yang besar pada politisi yang dominan dengan institusi aparatus negara yang tidak mengenal pribadi. Runciman menekankan bahwa di era abad kedua puluh satu yang cenderung stabil ini dibanding abad-abad sebelumnya adalah, masyarakat demokrasi barat belum pernah mengalami kemakmuran dan kemajuan seperti sekarang ini, sehingga pemahaman tentang suatu masyarakat yang gagal belum bisa dibayangkan. Memang teknologi



telah banyak mengubah kehidupan politik, kecepatannya membuat politik tidak berarti, namun pada jangka panjang,

"...Government upholds the rule of law...The consequences of state failure can sometimes be ameliorated by technological fixes, but they can't be remedied by them. For what, you need well-functioning states. In the end, only politics can rescue you from bad politics."

Secara jelas Runciman menegaskan bahwa siapapun yang menganggap bahwa inovasi teknologi yang didorong oleh kekuatan pasar saja bisa menyelesaikan masalah-masalah publik yang krusial seperti perubahan iklim, itu sama saja menipu diri sendiri, karena, pemain-pemain di pasar tidak akan berani untuk mengambil resiko besar yang bisa mendorong perubahan transformatif. *"Only governments do that. At the moment, the one government that is investing on a significant scale in green technology is China."*

Niall Ferguson seorang sejarawan ternama dalam bukunya *The Great Degeneration*, membangun suatu pendapat bahwa saat ini kondisi pemerintahan terutama yang mengacu pada sistem barat mengalami peningkatan kompleksitas tinggi yang pada akhirnya dapat menyebabkan pengambil kebijakan tidak berpikir secara jernih dalam memutuskan kebijakan publik karena kuatnya pengaruh-pengaruh kepentingan yang ada. Ia memberikan contoh bahwa di beberapa negara Skandinavia kecuali Finlandia yang mempunyai sistem *Welfare State* sebagian besar sudah melakukan reformasi kebijakan pendidikan dengan menyerahkan secara perlahan penangannya ke masyarakat walaupun peran negara tetap dipertahankan hal itu juga terjadi di Belanda. Ferguson

meminjam ungkapan Edmund Burke dalam bukunya *Reflections on the Revolution in France* (1790), *"SOCIETY is indeed a contract . . . the state . . . is . . . a partnership not only between those who are living, but between those who are living, those who are dead, and those who are to be born."* Maksud Ferguson adalah praktik bernegara yang sekarang terjadi dengan mengambil hutang begitu besar untuk pembangunan adalah suatu tindakan yang berbahaya terutama dengan mengorbankan masa depan. Dia juga menggarisbawahi bahwa setelah krisis ekonomi global terlewati maka akan ada dua jenis negara di dunia yaitu negara yang tersandera dengan jumlah hutang yang luar biasa atau negara yang memiliki aset berharga terutama cadangan sumber daya alam yang sudah terbukti. Sayangnya Indonesia tidak termasuk dalam sepuluh besar negara dengan cadangan sumber daya alam terbesar di dunia. Sejarah menunjukkan hanya negara dengan pencapaian inovasi teknologi dan ekspansi geopolitik yang menguntungkanlah yang bisa tumbuh berkembang dan keluar dari tumpukan hutang. Ferguson memperingatkan kita, bahwa jangan terlalu melebihkan pengaruh perkembangan teknologi karena arus pergerakan informasi yang terlalu cepat bisa berbahaya untuk masyarakat, *"Knowledge is not always the cure. And network effects are not always positive... There was great technological progress during the 1930s. But it did not end the Depression. That took a world war."*

Ferguson melihat dengan meminjam ungkapan Adam Smith bahwa dalam negara hukum yang pihak elitnya menjadi dominan sebagai pemburu rente dalam proses ekonomi dan politik maka negara tidak akan mengalami kemajuan. Hutang publik telah menjadi cara dari generasi yang lebih tua untuk hidup dengan mengorbankan generasi yang

lebih muda serta yang belum lahir. Regulasi semakin tidak bekerja secara efektif sampai pada titik di mana sistem menjadi rapuh. Pengacara yang bisa menjadi revolusioner di masyarakat yang dinamis menjadi parasit di suatu masyarakat yang statis. Masyarakat sipil yang independen menjadi tidak ada karena kalah pengaruh dengan kepentingan bisnis dan pemerintah yang sudah terlalu besar, di situlah terjadi kemunduran yang besar.

Liah Greenfeld menuliskan di dalam bukunya *Nationalism*, bahwa, nasionalisme itu pada dasarnya adalah suatu ide yang bersifat konseptual. Tanpa suatu ide mustahil nasionalisme dapat ada. Identitas nasional bukanlah identitas yang bersifat umum, tetapi bersifat khusus. Membangun suatu identitas adalah mungkin, sebagai suatu kebutuhan psikologis, sebagai bentuk sifat alamiah manusia. Namun membangun identitas nasional bukanlah suatu keharusan, dan hal ini penting untuk dicatat. Nasionalisme menurutnya, adalah suatu konsep yang diterima oleh masyarakat tertentu atas dasar kondisi solidaritas politik serta kondisi geopolitik dari populasi tertentu yang bisa diterima apabila ada aktor yang secara aktif menyebarkannya sehingga diterima masyarakat luas. Nasionalisme biasanya didahului dengan ketidakpuasan masyarakat terhadap identitas sebelumnya. Walaupun begitu, biasanya nilai-nilai tradisional diinterpretasikan ulang untuk kemudian diserap dan dijadikan bagian dari nilai-nilai nasionalisme tersebut. Dalam suatu masyarakat yang mengimpor suatu ide karena menganggap sumber yang dicontoh tersebut memiliki nilai-nilai lebih tinggi maka masyarakat tersebut akan merasa lebih rendah daripada sumber contohnya tersebut.

Dalam mewujudkan suatu ide, struktur dan kekuatan ide itu sendiri sebenarnya tidak ada artinya tanpa perjuangan atau usaha dari manusia yang terlibat dalam

proses pembangunan identitas tersebut, oleh sebab itu faktor manusia memegang peranan kunci. Nasionalisme bisa memiliki peranan yang besar di masyarakat adalah tidak lepas dari orang-orang yang berperan dalam mengartikulasikan dan memopulerkan ide tersebut. Perkembangan nasionalisme sesungguhnya ikut membentuk kondisi politik di mana sekarang kita tinggal, termasuk di dalamnya kita kemudian mengenal konsep kebangsaan. Pada bagian akhir dari penulisan Greenfeld menyampaikan bahwa, "*Nationality elevated every member of the community which it made sovereign. It guranteed status. National identity is, fundamentally, a matter of dignity. It gives people reasons to be proud.*"

Tokoh lain yang memiliki perhatian khusus tentang hal kebangsaan atau nasionalisme adalah Benedict Anderson, ia berpendapat bahwa, bangsa secara definisi dalam pendekatan antropologi adalah komunitas politik yang lahir dari imajinasi. Secara khusus ia melakukan penelitian juga di masyarakat Indonesia bahkan masyarakat pedesaan di Jawa. Alasan dia menggunakan istilah masyarakat yang lahir dari imajinasi adalah karena dalam bangsa yang terkecil sekalipun akan ada orang-orang yang saling tidak mengenal atau tidak pernah bertemu sekalipun, namun dalam pikiran mereka hidup suatu pemahaman bahwa mereka adalah satu masyarakat yang hidup sebagai satu kesatuan. Pada dasarnya setiap masyarakat atau komunitas yang lebih besar dari desa primordial yang memungkinkan tatap muka adalah komunitas yang terimajinasi. Namun demikian imajinasi tersebut memiliki batasan, karena bangsa yang terbesar sekalipun ada batasnya karena setelah itu ada bangsa lainnya. Bangsa diimajinasikan berdaulat karena lahir di zaman Pencerahan dan Revolusi di mana kekuasaan yang



didasarkan pada mandat abadi serta dinasti yang hirarkis diruntuhkan. Akhirnya Anderson menyimpulkan bahwa bangsa,

“...is imagined as a community, because, regardless of the actual inequality and exploitation that may prevail in each, the nation is always conceived as a deep, horizontal comradeship. Ultimately it is this fraternity that makes it possible, over the past two centuries, for so many millions of people, not so much to kill, as willingly to die for such limited imaginings.”

Nasionalisme yang tumbuh di barat pada umumnya adalah akibat pertentangan antara penguasa-penguasa feodal dengan rakyat yang sudah melihat para penguasa tidak memiliki legitimasi. Contohnya Revolusi Prancis, Revolusi Bolshevik dan Revolusi Amerika Serikat. Sedangkan di Asia Afrika revolusi yang terjadi adalah karena kesadaran akan keterjajahan yang dijalankan oleh bangsa-bangsa barat terhadap rakyat di Asia Afrika. Tokoh kemerdekaan India Jawaharlal Nehru berpendapat bahwa selama suatu negara tidak menguasai dengan baik jaringan-jaringan ekonomi yang berhubungan dengan kepentingan vitalnya negaranya, maka kemerdekaan politik tidak serta merta membuat negara tersebut merdeka. Ia mencontohkan negara-negara di Amerika Latin pada dekade 1930-an, dikuasai secara ekonomi oleh Amerika Serikat meskipun negara tersebut secara hukum dan politik merdeka, kekuasaan asing tidak kelihatan tapi begitu kegiatan masyarakat berjalan, kekuasaan itu benar-benar mencengkram. Nehru melihat bahwa bank-bank serta perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang ada di Amerika Latin yang digerakkan oleh kapitalis Amerika tidak lain bisa

berjaya adalah karena dukungan pemerintah Amerika Serikat yang kokoh.

Di Indonesia tokoh kemerdekaan yang menonjol adalah Bung Karno. Beliau memperkenalkan kepada masyarakat luas adalah tentang pergeseran imperialisme lama menjadi imperialisme baru. Menurut beliau pada intinya imperialisme itu adalah sama yaitu suatu nafsu untuk menguasai dan mengontrol bumi dan bangsa lain. Dalam hal fisik imperialisme membuat kehidupan sosial ekonomi bangsa Indonesia tertindas namun secara rohaniah membuat bangsa Indonesia selalu merasa tidak mampu untuk berdiri sendiri dan mengatur dirinya sendiri, bangsa Imperialis selalu meniupkan pemahaman bahwa bangsa Indonesia tidak beradab sehingga butuh pembimbing, tidak mampu dalam ini dan itu sehingga membutuhkan teladan. Kesadaran yang ditunjukkan Bung Karno tersebut sangat berguna bagi generasi muda saat ini, di mana saat ini banyak terjadi cara-cara yang sama yaitu mengadu domba bangsa Indonesia dengan didorong untuk membuka ‘kebenaran’ yang pada ujungnya hanya bertujuan agar bangsa Indonesia saling berkelahi, sehingga kemudian kita merasa tidak mampu bersatu dan membutuhkan bantuan untuk hidup lebih ‘beradab’.

Bung Karno berpendapat, perbedaan imperialisme lama dan baru adalah, imperialisme baru berwajah sopan dan membawa ide-ide yang seolah-olah membawa keteraturan, namun pada akhirnya itu semua bukan untuk kepentingan kaum rakyat jelata yang beliau perkenalkan dengan nama kaum Marhaen, tetapi untuk kepentingan kaum imperialis tersebut. Beliau mengajak rakyat untuk sadar dan mengorganisir diri, sehingga mampu membuat perubahan kehidupan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Nasionalisme yang Bung Karno perjuangkan adalah nasionalisme

yang membawa perubahan kehidupan bagi rakyat sampai strata terbawah, sehingga bukan nasionalisme ningrat apalagi bukan nasionalisme borjuis.

PENUTUP

Kesimpulan

Konsep-konsep geopolitik, negara dan bangsa yang saat ini berkembang memang banyak berasal dari tradisi pemikiran barat baik yang berasal dari Eropa maupun Amerika Serikat, namun demikian setiap perkembangan konsep tidak bisa dilepaskan dari sudut pandang kepentingan apa konsep tersebut berasal. Oleh sebab itu dalam tulisan ini dijelaskan mengenai perbedaan mendasar suatu proses pembentukan bangsa yang terjadi di bekas negara-negara jajahan sebagaimana dijelaskan oleh Nehru dan Bung Karno, dibandingkan dengan negara-negara penjajah. Karena apabila kita tidak menyadari hal ini kita akan terus terjebak dengan mentalitas dengan sudut pandang yang tidak tepat terhadap kepentingan nasional.

Saran

Pemahaman pengambil kebijakan suatu negara atau non-negara terhadap perkembangan konsep geopolitik, negara dan bangsa pada masa kini sangat menentukan arah pembentukan kebijakan strategis setiap negara atau entitas non-negara. Atas dasar hal ini maka pengambil kebijakan strategis Indonesia juga harus menyadari perkembangan-perkembangan tersebut. Selain itu, juga harus menyadari bahwa melakukan transplantasi suatu konsep tanpa memahami asal usul konsep tersebut dapat mencederai kepentingan nasional. Kompleksitas dari realitas geopolitik, negara dan bangsa membutuhkan suatu studi mendalam yang penuh kesadaran terhadap segala kemungkinan yang dapat terjadi serta

kesabaran dalam memahami dan kemudian memformulasikan kebijakan strategis. Kesabaran menjadi suatu faktor penting dalam formulasi kebijakan strategis karena sebagaimana dijelaskan oleh Serat Sasangka Jati bahwa hal tersebut menyangkut proses penyerapan informasi yang luas namun teliti serta dijalankan dengan tidak emosional. Selain itu kesabaran adalah suatu usaha yang memudahkan untuk menghadapi perkara yang sukar dan gawat, karena didasarkan pada tindakan yang sesuai kemampuan secara teratur dan teliti sampai tercapai apa yang dicita-citakan.

Usaha memperjuangkan kepentingan nasional jelas suatu usaha yang menghadapi situasi yang berbahaya dan sukar karena kepentingan nasional setiap bangsa kerap berbenturan sebagaimana sejarah telah mengajarkan kepada kita. Oleh sebab itu sikap yang meremehkan ancaman terhadap keselamatan nasional seyogyanya dihindari oleh pengambil kebijakan strategis Indonesia, namun yang diperlukan adalah usaha tekun memahami segala dinamika geopolitik yang terjadi hingga terjaganya kepentingan nasional Indonesia secara kokoh.

Dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara pembagian kekuasaan negara dalam tugas-tugas khusus setiap bagian dari instansi pemerintahan kerap menimbulkan kesulitan komunikasi antar lembaga negara, sehingga berujung pada besarnya potensi terjadi disinformasi di masyarakat. Hal ini akan menjadi lebih beresiko dengan maraknya hoax yang disebar dengan cepat melalui media sosial digital. Besarnya tanggung jawab serta kewenangan eksekutif yang berujung pada kompleksitas organisasi pemerintah, telah mendorong Presiden sebagai kepala pemerintahan mengambil salah satu langkah strategis yaitu mengenai harmonisasi informasi publik oleh Pemerintah



sebagaimana tertuang dalam Inpres 9 Tahun 2015.

Dalam prakteknya memang tetap tidak mudah, menyatukan langkah lembaga negara dengan segala kompleksitasnya, maka tulisan ini menyarankan,

1. kepada setiap lembaga negara terlibat dalam dialog-dialog berkaitan dengan kepentingan geopolitik nasional dan perkembangannya baik akibat tekanan global, regional maupun domestik;
2. dialog-dialog tersebut dilaksanakan antar lembaga negara yang memiliki tugas dan kewenangan yang saling berhubungan;
3. dialog antar lembaga tersebut paling tepat difasilitasi oleh Lemhannas RI yang sejak awal pendiriannya merupakan wadah untuk menyatukan persepsi bangsa dalam konteks geopolitik;
4. pelaksanaan dialog dapat bersifat personal seperti pendidikan di PPRa maupun PPSA maupun dalam bentuk kelompok sebagaimana dalam kegiatan Taplai, seperti yang sudah pernah berjalan untuk para diplomat, anggota DPR RI, DPD RI dsb;
5. dialog tersebut harus dijalankan secara rutin dan kontinyu dengan dukungan penuh Presiden selaku kepala negara serta pimpinan lembaga negara lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Benedict Anderson, *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, (London: Verso, 1983)
- Budi Susilo Soepandji, *Dokumentasi Sambutan Gubernur Lemhannas Republik Indonesia pada Acara Rakernas III, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Jakarta, 6 September 2013*, (Jakarta: Krisna Strategic Policy Firm, 2014)
- Chas. W. Freeman Jr. *Arts of Power : Statecraft and Diplomacy*. Washington D.C : United States Institute Of Peace Press, 1997.
- Collin Flint. *Introduction to Geopolitics*. Second Edition. (New York: Routledge, 2012)
- David Runciman, *Politics*, (London: Profile Books LTD, 2014)
- Djokosoetono, *Ilmu Negara dihimpun oleh Harun Al Rasid*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985)
- Dominique Moisi, *The Geopolitics of Emotion: How Cultures of Fear, Humiliation, and Hope Are Reshaping The World*, (New York: Doubleday, 2009)
- Editors of Time Magazine, with editor Donald Morrison, *Mikhail S. Gorbachev: An Intimate Biography*, (New York: A Time Book, 1988)
- Klaus Dodds, *Geopolitics: A Very Short Introduction*, (Oxford: Oxford University Press, 2014)
- G. Dwipayana dan Ramadhan K.H, “Soeharto : My Thoughts, Words and Deeds”
- Henry Kissinger. *World Order*. (New York: Penguin Press). 2014.
- Henry Kissinger. *On China*. (New York: The Penguin Press, 2011)
- H.E.H. Mosler, “International Society as a Legal Community”, di dalam *Recueil Des Cours, Collected Courses of the Hague Academy of International Law IV*. (The Hague: A.W. Sijthoff, 1976)
- Jawaharlal Nehru, *Glimpses of World History*, (New Delhi: Penguin Books, 2004)
- Kris Wijoyo Soepandji, et al, Budi Susilo Soepandji’s Service: For God, Humanity and the Nation, (Jakarta: Krisna Strategic Policy Firm, 2017)
- Liah Greenfeld. *Nationalism: Five Roads to Modernity*. (USA: Harvard University Press). 1993.
- MR. ST. Munadjat Danusaputro. *Pembangunan Hukum Lingkungan (Dalam Rangka Binamulia Hukum dan Lingkungan Untuk Pembangunan Nasional & Internasional*

- al dalam Kumpulan Pidato-Pidato Pengukuhan: Beberapa Guru Besar Berbicara tentang Hukum dan Pendidikan Hukum. (Bandung: Penerbit Alumni, 1981)
- Niall Fergusson. *The Great Degeneration: How Institutions Decay and Economics Die*. (New York: Penguin Books, 2012).
- Pippa Malmgren, *Geopolitics for Investors*, (New York: CFA Institute Research Foundation, 2015)
- R. Soenarto Mertowardojo, *Sasangka Jati*, (Surakarta: Paguyuban Ngesti Tunggal, 1954).
- Saul Bernard Cohen, *Geopolitics: The Geography of International Relations*, (Lanham: Rowman & Littlefield, 2015)
- Simon Sebag Montefiore, *Stalin: The Court of the Red Tsar*, (London: Phoenix, 2004)
- Steven Lee Myers, *The New Tsar: The Rise and Reign of Vladirmir Putin*, (London: Simon & Schuster, 2015)
- Sophie Chautard, *La Géopolitique*, (Levallois Perret: Studyrama, 2009), backcover.
- Sukarno. *Dibawah Bendera Revolusi*. (Jakarta: Yayasan Bung Karno). 2015.
- Tim Pengajar Mata Kuliah Ilmu Negara, *Ilmu Negara*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015)
- “History of Voting Rights,” dalam <http://massvote.org/voterinfo/history-of-voting-rights/> diakses pada 26 Agustus 2017.
- tors, (New York: CFA Institute Research Foundation, 2015), 5.
6. Saul Bernard Cohen, *Geopolitics: The Geography of International Relations*, (Lanham: Rowman & Littlefield, 2015), 16.
7. Collin Flint. *Introduction to Geopolitics*. Second Edition. (New York: Routledge, 2012), 35.
8. Malmgren, *Geopolitics*, 6.
9. Kris Wijoyo Soepandji, et al, *Budi Susilo Soepandji’s Service: For God, Humanity and the Nation*, (Jakarta: Krisna Strategic Policy Firm, 2017), 12.
10. Cohen, *Geopolitics*, 1.
11. Collin. *Geopolitics*. 34.
12. Budi Susilo Soepandji, *Dokumentasi Sambutan Gubernur Lemhannas Republik Indonesia pada Acara Rakernas III, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan*, Jakarta, 6 September 2013, (Jakarta: Krisna Strategic Policy Firm, 2014), 7.
13. MR. ST. Munadjat Danusaputro. *Pembangunan Hukum Lingkungan (Dalam Rangka Binamulia Hukum dan Lingkungan Untuk Pembangunan Nasional & Internasional dalam Kumpulan Pidato-Pidato Pengukuhan: Beberapa Guru Besar Berbicara tentang Hukum dan Pendidikan Hukum*. (Bandung: Penerbit Alumni, 1981), 127.
14. Henry Kissinger. *On China*. (New York: The Penguin Press, 2011), 2-3.
15. Flint, *Geopolitics*, 47
16. Malmgren, *Geopolitics*, 48
17. Malmgren, *Geopolitics*, 49.
18. Djokosoetono, *Ilmu Negara dihimpun oleh Harun Al Rasid*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 13.
19. H.E.H. Mosler, “International Society as a Legal Community”, di dalam *Recueil Des Cours, Collected Courses of the Hague Academy of International Law IV*. (The Hague: A.W. Sijthoff, 1976)
20. Tim Pengajar Mata Kuliah Ilmu Negara,

Endnotes

1. R. Soenarto Mertowardojo, *Sasangka Jati*, (Surakarta: Paguyuban Ngesti Tunggal, 1954), 56-57.
2. Klaus Dodds, *Geopolitics: A Very Short Introduction*, (Oxford: Oxford University Press, 2014), 1.
3. Dodds, *Geopolitics*, 17.
4. Sophie Chautard, *La Géopolitique*, (Levallois Perret: Studyrama, 2009), backcover.
5. Pippa Malmgren, *Geopolitics for Inves-*



- Ilmu Negara, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015), 16 dan 18.
21. Steven Lee Myers, *The New Tsar: The Rise and Reign of Vladirmir Putin*, (London: Simon & Schuster, 2015), 48-49.
 22. Editors of Time Magazine, with editor Donald Morrison, Mikhail S. Gorbachev: *An Intimate Biography*, (New York: A Time Book, 1988), 144-145
 23. Simon Sebag Montefiore, *Stalin: The Court of the Red Tsar*, (London: Phoenix, 2004), 501.
 24. Freeman., *Statecraft*, 9
 25. Henry Kissinger. *World Order*. (New York: Penguin Press). 2014. 2-10
 26. Kissinger, *Order*, 7.
 27. G. Dwipayana dan Ramadhan K.H. , “Soeharto : My Thoughts, Words and Deeds”, 412-413
 28. Dominique Moisi, *The Geopolitics of Emotion: How Cultures of Fear, Humiliation, and Hope Are Reshaping The World*, (New York: Doubleday, 2009), 153.
 29. Kissinger, *Order*, 8.
 30. “History of Voting Rights,” dalam <http://massvote.org/voterinfo/history-of-voting-rights/> diakses pada 26 Agustus 2017.
 31. David Runciman, *Politics*, (London: Profile Books LTD, 2014), 19.
 32. Runciman, *Politics*. 19.
 33. Runciman, *Politic*. 39.
 34. Runciman, *Politics*. 58.
 35. Runciman, *Politics*. 64.
 36. Runciman, *Politics*. 66-67.
 37. Runciman, *Politics*. 71.
 38. Niall Fergusson. *The Great Degeneration*. 129
 39. Fergusson, *Degeneration*. 43
 40. Fergusson, *Degeneration*. 143
 41. Fergusson, *Degeneration*. 147
 42. Fergusson, *Degeneration*. 149
 43. Fergusson, *Degeneration*. 151
 44. Liah Greenfeld. *Nationalism: Five Roads to Modernity*. (USA: Harvard University Press). 1993. 5
 45. Greenfeld, *Nationalism*. 12
 46. Greenfeld. *Nationalism*. 14
 47. Greenfeld. *Nationalism*. 15
 48. Greenfeld. *Nationalism*. 19
 49. Greenfeld. *Nationalism*. 22
 50. Greenfeld. *Nationalism*. 21
 51. Greenfeld, *Nationalism*, 487.
 52. Benedict Anderson, *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, (London: Verso, 1983), 6-7.
 53. Anderson, *Imagined*, 7.
 54. Jawaharlal Nehru, *Glimpses of World History*, (New Delhi: Penguin Books, 2004), 660-663.
 55. Sukarno. *Dibawah Bendera Revolusi*. (Jakarta: Yayasan Bung Karno). 2015. 6-360
 56. Ibid.
 57. Sasangka Jati, 14
 58. Ibid, 15.-